

## **Pemaknaan Ulang Terhadap Peringatantrage di Nasional 65 Dan Upaya Rekonsiliasi Di Tingkat Daerah**

**Sigit Widiatmoko, Alfian Fahmi A.,**

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Nusantara Nusantara PGRI Kediri  
[sigitwidiatmoko1963@gmail.com](mailto:sigitwidiatmoko1963@gmail.com), [alfianf999@gmail.com](mailto:alfianf999@gmail.com)

Tahun 1965 merupakan periode krusial di Indonesia karena terdapat dua peristiwa penting yang saling berkaitan. Pertama, adalah peristiwa G30S yang mengakibatkan terbunuhnya beberapa tokoh penting angkatan darat, yang kedua peristiwa pembantaian massal terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua peristiwa ini merupakan puncak dari konflik antar golongan pada masa demokrasi terpimpin. Dalam kajian sejarah peristiwa G30S memunculkan beragam perspektif berkaitan dengan siapa dalang dibalik peristiwa tersebut. Sedangkan khusus peristiwa kedua menimbulkan polemik tak berujung terutama dari pihak keluarga korban mengenai siapa yang bertanggung jawab atas tindakan pembantaian massal. Terlepas dari polemik-polemik yang ada, tragedi 1965 selalu dikenang setiap tahun oleh masyarakat sebagai hari kesaktian Pancasila. Disaat peringatan itulah selalu muncul perdebatan nasional dengan tema rekonsiliasi dan rehabilitasi bagi korban peristiwa 1965 yang sampai saat ini belum menemui titik temu. Peringatan tragedi 1965 juga secara tidak langsung membangkitkan memori kolektif masyarakat Indonesia tentang kekejaman komunisme, yang pada akhirnya memunculkan wacana anti komunis dan ketakutan tentang kebangkitan komunisme atau **Komunistophobi** (trauma terhadap komunis). Tulisan ini akan membahas setidaknya dua hal utama, yakni perdebatan tentang rekonsiliasi dan rehabilitasi korban peristiwa 1965 dan kedua adalah munculnya fenomena **Komunistophobi**.

**Kata Kunci : Pemaknaan Ulang, Peringatan Tragedi Nasional 65, Rekonsiliasi**

### **PENDAHULUAN**

Dalam perjalanan panjang sebagai sebuah negara yang merdeka, bangsa Indonesia tentunya tidak lepas dari dinamika konflik yang menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara negeri ini. Salah satu persoalan yang mungkin masih menyisakan tanda tanya dan mungkin tidak berujung penyelesaiannya adalah peristiwa 1965. Pada hakikatnya peristiwa 1965 ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama adalah pembunuhan terhadap 7 jenderal (walaupun dalam kenyataannya yang terbunuh hanya 6 jenderal sedangkan 1 korban merupakan pengawal jenderal Nasution), yang kedua adalah peristiwa pembantaian massal di tingkat lokal sebagai puncak konflik dan konfrontasi antar partai atau golongan. Pada bagian pertama yakni pembunuhan tujuh jenderal, untuk menyebut gerakan ini dikenal berbagai istilah yang berbeda namun merujuk peristiwa yang sama, istilah tersebut sebagai contohnya adalah gerakan 30 september (G30S), gerakan september 30 (GESTAPU), atau Gerakan satu oktober (GESTOK). Namun dari ketiga istilah tersebut yang lebih akrab dan dikenal masyarakat adalah G30S/PKI yang sebenarnya adalah istilah yang berkembang dari G30S, sedangkan imbuhan PKI secara tidak langsung merujuk pada justifikasi PKI sebagai pelaku utama dalam G30S, dimana tuduhan ini diciptakan oleh Suharto, Yoga Sugomo dan Sudharmono

Bagian kedua dalam tragedi 1965 adalah pembantaian massal di tingkat daerah sebagai puncak ketegangan pada tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan peristiwa pembunuhan tujuh jenderal yang diberitakan dilakukan secara keji oleh PKI, menjadikan momentum tersebut sebagai pemicu terjadinya pembantaian massal dan penangkapan besar-besaran terhadap mereka yang dicurigai terlibat dalam komunis. Hal ini sesuai yang pendapat dari Ben Anderson yakni "propaganda yang dilakukan media dan militer ini dilakukan untuk menciptakan atmosfer hysteria di seluruh Indonesia yang mendorong pembantaian lebih dari setengah juta tanpa proses pengadilan dan John Roosa yang mengatakan pemberitaan bohong ini bagai minyak tanah yang disiramkan ke api dan menyambar-nyambar dan

berujung pada pembantaian massal".<sup>1</sup> Pembantaian massal yang terjadi di daerah-daerah terutama Jawa dan Bali sebagai daerah dengan jumlah terbesar, menyisakan luka mendalam baik bagi keluarga yang meninggal akibat pembantaian, maupun korban yang ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses pengadilan, serta keluarganya dimana stigma atau lebel buruk yang melekat pada mereka anggota keluarga komunis, menjadikan kehidupan sosial ekonomi mereka dalam kondisi yang sulit semasa orde baru berkuasa.

Pasca negara ini mengalami sebuah momentum perubahan fundamental dalam pemerintahan dengan lengsernya pemerintahan otoriter Suharto setelah 32 tahun berkuasa atau biasa dikenal sebagai reformasi 1998, perlahan-lahan negara ini menuju pemerintahan yang demokratis dan terbuka. Momentum ini dimanfaatkan oleh mereka yang mengidentifikasikan dirinya sebagai "**korban**" dan merasa kehilangan hak hidupnya selama menjadi Tahanan Politik ataupun mendapat stigma komunis untuk mengajukan tuntutan pada negara terhadap tindakan diskriminatif yang dialami mereka. Fenomena ini menarik untuk diamati, dimana selama ini masyarakat terkesan menganggap pembantaian massal merupakan hal yang logis sebagai konsekuensi perbuatan komunis terhadap jenderal yang telah mereka bunuh. Namun seiring berkembangnya waktu mulai terdapat pergeseran dalam cara memaknai peristiwa 1965, definisi korban tidak hanya disematkan pada tujuh tentara yang meninggal namun mereka yang terkena imbas akibat label komunis yang disandang juga mulai menyebut dirinya juga korban dari peristiwa 1965, mereka inilah yang pada era ini menyuarakan tuntutan-tuntutan rekonsiliasi nasional yang pada intinya berisi permohonan maaf dari negara, adanya ganti rugi dari negara serta pengakuan dari negara akan adanya pembantaian massal serta penangkapan terhadap mereka yang tanpa dasar.

Namun tidak semudah yang dibayangkan, angin reformasi nampaknya tidak terlalu berhembus kencang kepada para korban ini. walaupun upaya rekonsiliasi dan mediasi telah beberapa kali dilakukan nampaknya keadilan yang diharapkan belum berhasil didapatkan. Ditengah isu rekonsiliasi yang sedang hangat diperbincangkan, muncullah fenomena unik lain yang masih berhubungan dengan komunis, yakni penangkapan mereka yang memakai kaos bergambarkan palu arit serta adanya tindakan penyitaan beberapa buku beraliran kiri sehingga memunculkan isu dimasyarakat tentang "kemungkinan bangkitnya komunis atau PKI di Indonesia". opini ini menurut beberapa orang dianggap cukup rasional namun beberapa orang juga menganggap opini ini sebagai bentuk *Komunistophobi*.

## PEMBAHASAN

### 1. Rekonsiliasi dan Rehabilitasi Korban Peristiwa 1965 sebagai isu nasional

Dalam resensi terhadap buku John Roosa berjudul *Dalih pembunuhan massal Asvi Warman Adam* memberikan kesimpulan tentang uraian John Roosa bahwa sudah seyogyanya diskusi kini beralih tentang bagaimana proses pembunuhan massal 1965 itu terjadi dan mengapa sampai memakan korban sedemikian banyak? jadi yang patut dipertanyakan bukan lagi sekedar 'siapa dalang dibalik penculikan Jenderal' melainkan siapa dalang pembantaian 1965.<sup>2</sup> Berangkat dari uraian tersebut maka sebelum membahas rekonsiliasi dan rehabilitasi korban peristiwa 1965 tulisan ini akan dimulai dengan kronologis singkat pembantaian massal tahun 1965. Hal ini penting karena peristiwa ini menjadi permasalahan yang menimbulkan persoalan berkepanjangan terutama dari pihak yang menjadi korban.

Mengingat pembantaian yang terjadi sifatnya tidak bisa dipastikan secara detail lokasi atau daerah-daerah kejadian, maka akan diulas berdasarkan data-data yang telah ada dan mudah diperoleh, di Jawa Timur tepatnya daerah Kediri perkiraan jumlah total korban pembunuhan massal berkisar 8.256-13.760 jiwa,<sup>3</sup> sedangkan di Jombang jumlahnya mencapai 3000-3500 jiwa.<sup>4</sup> Sedangkan mengenai jumlah korban yang meninggal di seluruh Indonesiapara ahli sejarah secara umum berpendapat bahwa jumlah korban meninggal mencapai lebih dari setengah juta mengenai berbagai versi jumlah korban bisa dilihat pada

<sup>1</sup> Ben Anderson dan John Roosa dalam *Kitab Merah : Kumpulan Kisah-Kisah Tokoh G30S/PKI*

<sup>2</sup> Asvi Warman Adam, *Historiografi Gerakan 30 September: Dalang Penculikan Jenderal atau Dalang Pembantaian?*, Jurnal Sejarah Vol. 14 No. 1, Th. 2009, hlm.74.

<sup>3</sup> Hermawan Sulistiyo, *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)*, cetakan ke-3, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2013, hlm. 39

<sup>4</sup> Ibid hlm. 39

karya Robert Cribb.<sup>5</sup> Lebih lanjut Cribb menjelaskan 4 metode yang dapat digunakan dalam mengetahui jumlah korban yang pertama adalah dengan cara mengutip keterangan resmi pemerintah atau instansi kewanitaan, kedua dengan menghitung jenazah yang menjadi korban pembantaian, ketiga dengan meminta kesaksian dari korban yang kebetulan selamat dan cara keempat adalah dengan teknik demografi.<sup>6</sup>

Selain korban tewas terdapat lagi mereka yang dituduh anggota komunis yang kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Di Kediri hanya anggota PKI yang bukan tokoh saja yang selamat dari teater pembantaian massal. Seorang saksi percaya mereka yang selamat hanya tahanan politik kelas C. Saksi lain memperkirakan sedikitnya 75% pengurus partai tingkat desa ke atas lenyap.<sup>7</sup> Kediri juga penyumbang tahanan PKI terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan data Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Timur pada 1981, jumlah tahanan berasal dari Kediri berjumlah 83.800 orang.<sup>8</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat pada peristiwa 1965-1966 yang dilakukan pada 2012, menyatakan bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat.<sup>9</sup> Dari sepuluh jenis kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan, sembilan diantaranya terdapat pada peristiwa 65, antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Hanya satu kategori kejahatan yang tidak terdapat dalam peristiwa 65 yaitu kejahatan apartheid.

Jika deskripsi Komnas HAM dan jika hal itu diletakkan pada korban tragedi 1965 kita bisa membuat klasifikasi korban : 1. Korban terbunuh baik itu PKI maupun yang diduga PKI 2. Korban yang ditangkap karena dituduh PKI atau memang PKI 3. Korban yang tidak ditangkap dan jelas bukan anggota PKI, namun memiliki kedekatan ataupun hubungan kekerabatan atau darah sehingga menderita kerugian material dan non material. Korban jenis kedua dan ketiga inilah yang saat ini gencar menyuarakan isu rekonsiliasi nasional .

Korban dengan tipe keduwaini lebih akrab disebut sebagai Tapol(Tahanan Politik) dan banyak diantara mereka yang dipenjarakan bertahun-tahun tanpa mengerti kesalahan serta tanpa proses pengadilan sebagai contohnya Pramodya Ananta Toer yang merupakan ketua LEKRA,<sup>10</sup> belum lagi siksaan yang didapat ketika menjadi tahanan di penjara, atau ketika di pindahkan ke pulau buru.<sup>11</sup> Contoh korban kedua yang lain adalah Hesri Setyawan yang saat ini sedang mendapat sorotan lewat karya film dokumenternya tentang pulau buru. Sedangkan korban jenis ketiga ini sebagai contohnya banyak dialami oleh mereka yang merupakan anggota keluarga atau kerabat para tahanan yang dituduh atau memang terlibat komunis. Sebagai contohnya adalah apa yang dialami keluarga Aidit terutama anak dan istrinya yang sempat terpisah demi keamanan, dan bahkan banyak keluarga Aidit yang mengganti nama karena takut akan adanya pembunuhan. Menurut pengakuan Ilham Aidit yang merupakan anak D.N Aidit semasa kuliahnya

---

<sup>5</sup> Robert Cribb, *The Indonesian Killings : Pembantaian PKI Di Jawa dan Bali 1965 – 1966*, Penerbit Mata Bangsa, Yogyakarta, 2003, hlm. 23-24

<sup>6</sup> Ibid, hlm. xvi-xvii

<sup>7</sup> Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Hermawan Sulistyono, yang dimaksud dengan tahanan kelas C adalah mereka yang bukan anggota dan tidak tersangkut langsung dengan PKI sedangkan yang lain, kelas A adalah elit partai yang dianggap berbahaya, dan kelas B adalah yang dianggap terkait langsung dengan PKI, biasanya anggota organisasi sayap. Hermawan Sulistyono, op. cit., hlm. 218.

<sup>8</sup> Kurniawan, dkk, *Pengakuan Algojo 1965*, cetakan ke-1, Tempo Publishing, Jakarta, 2013, hlm. x-xi.

<sup>9</sup> ELSAM, Ringkasan Eksekutif Penyelidikan Peristiwa 65.

<sup>10</sup> Untuk lebih jelas tentang proses penangkapan Pram, lihat artikel berjudul Surat Terbuka Pramodya Ananta Toer dalam Kitab Merah : Kumpulan kisah-kisah G30S/PKI

<sup>11</sup> Berdasarkan hasil penyelidikan tentang pelanggaran HAM berat peristiwa 1965-1966 oleh Komnas HAM didapatkan keterangan sebagai berikut : Para saksi yang memberikan keterangan dibawah adalah saksi-saksi yang mengalami langsung penyiksaan yang dilakukan oleh para pelaku di LP Pekambangan dalam masa penahanan mereka. Selain mengalami langsung penyiksaan, sebagian saksi juga melihat para pelaku melakukan penyiksaan terhadap para korban yang lain, selain itu dari laporan komnas HAM ini didapat kesimpulan bahwa Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum sebagai "Peristiwa Gerakan 30 September" atau terdapatnya bukti permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana Perbudakan, di Pulau Buru, Maluku dalam kurun waktu setidaknya-tidaknya pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1978

pun mengaku semuanya serba terbatas dan dibatasi dan Ilham juga mengaku kerap menerima teror dan caci maki.

Keterbatasan yang dialami Ilham Aidit ini tentunya merupakan konsekuensi kebijakan yang diterapkan ORBA yakni penerapan aturan bersih lingkungan dengan tujuan untuk memastikan kebersihan pegawai pemerintah dari unsur PKI. Pemerintah berwenang memecat pegawai jika diketahui bahwa keluarganya merupakan bekas anggota PKI. Bahkan pemerintah juga mengeluarkan surat keterangan yang disebut surat bersih diri.<sup>12</sup> Contoh korban golongan ketiga yang lain ini adalah mereka yang justru tidak sangkut pautnya kepada PKI secara organisasi ataupun hubungan kekerabatan. Ironi ini yang dialami Rony Marton dan para pelajar lain yang belajar ke Ceko, dimana pasca kejadian 1965, para pelajar ini diminta untuk berikrar setia pada negara yang dipimpin ORBA namun menolaknya dan akibat dari penolakan ini adalah dicabutnya paspor serta hilangnya kewarganegaraan Indonesia.<sup>13</sup>

Terdapat hal yang menarik untuk dicermati terhadap kesaksian dari mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai korban peristiwa 1965, terutama pada tipe kedua dan ketiga. Dengan label korban yang mereka sematkan pada diri mereka sendiri seakan membuka kebenaran yang selama ini tidak disadari oleh masyarakat. Selama ini, terutama pada saat rezim ORBA berkuasa pemahaman masyarakat tentang korban peristiwa 1965 adalah tujuh tentara dan menganggap apa yang terjadi terhadap mereka yang menjadi korban entah itu pembantaian massal ataupun mereka yang terkena imbas akibat label komunis yang melekat pada mereka merupakan konsekuensi yang logis akibat kejahatan yang PKI lakukan.<sup>14</sup> Lalu apa yang menyebabkan mereka mengidentifikasi dirinya sebagai korban dan factor apa yang mendorong munculnya identitas atau konsep korban yang baru ini,?

Jawaban untuk persoalan diatas bisa disimak melalui uraian Budiawan dengan tema "politik memori dan identitas eks-tapol 1965". Dalam kesimpulannya Budiawan mengatakan pemaknaan atas identifikasi sebagai korban dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah kadar afinitas politik dengan PKI, kedua adalah proses ditahan dan pengalaman selama ditahanan. Para Eks Tapol yang ikatan politiknya dengan PKI atau ormasnya rendah, mengidentifikasi dirinya sebagai korban fitnah orang-orang yang tidak menyukai mereka atau yang ingin menjarah harta milik serta jabatan mereka. Kelompok yang mengidentifikasi dirinya sebagai korban fitnah itu memandang masa selama di tahanan sebagai bentuk perampasan segala hal yang telah mereka miliki.

Sedangkan para Eks Tapol yang ikatan politiknya dengan PKI atau ormasnya tinggi cenderung mengidentifikasi diri sebagai korban peperangan yang tidak mereka ikuti. Para Eks Tapol kategori ini menolak dijustifikasi sebagai pelaku atau terlibat dalam G30S karena mereka bahkan mengetahui peristiwa tersebut setelah dua atau tiga hari pasca peristiwa. Mereka juga menolak bahwa PKI sebagai dalang peristiwa penculikan para jenderal walaupun mereka tidak menyangkal keterlibatan para pemimpin pusat dalam G30S. Mereka ini berkeyakinan bahwa peristiwa tersebut lebih sebagai pertarungan politik para elite. Bagi mereka penjara adalah resiko berpolitik namun penjara yang mereka alami bukanlah suatu konsekuensi yang adil.<sup>15</sup> Kedua Tipe Eks Tapol inilah yang berkontribusi besar terhadap isu-isu dimunculkannya rekonsiliasi dan rehabilitasi. Keberanian dalam menyuarakan rekonsiliasi juga di tunjang dengan adanya peristiwa reformasi 1998 yang membuka kran kebebasan untuk mereka menyuarakan tuntutan-tuntutannya. Hal ini mendorong pemerintah pasca reformasi untuk mencoba menyelenggarakan upaya rekonsiliasi nasional namun hasilnya bisa dikatakan belum memuaskan.

50 tahun lebih pasca tragedi mengerikan tersebut berlalu, penyelesaian tidak pernah menemui titik terang. Tuntutan dari mereka yang menampilkan dirinya sebagai korban untuk memperoleh keadilan

---

<sup>12</sup>John Roosa, dkk, *Tahun Yang Tak Pernah Berakhir*, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2004, hlm.17

<sup>13</sup>Pengakuan Rony Marton ini disampaikan pada acara Mata Najwa di Metro Tv dengan Tema *Dibui Tanpa Jeruji*, disiarkan tanggal 27 Januari 2016

<sup>14</sup>Menurut Budiawan, Rezim otoriter akan senantiasa melakukan praktik penarasian tentang kekerasan yang telah dilakukan. Agar praktik kekerasan itu tampak absah (legitimate), maka narasi atas kekerasan itu dibangun di atas wacana ideology besar diseperti apa yang di klaim sebagai kepentingan bangsa dan negara. Disitulah Negara melakukan hegemonisasi memori kolektif. Negara melakukan seleksi atas apa yang harus diingat dan dilupakan oleh masyarakat.

<sup>15</sup>Budiawan, , *Rehabilitasi Eks-Tapol "Peristiwa 1965"* dalam *Sejarah Sebagai Humaniora* , OMBAK, Yogyakarta, 2014, hlm 33

seakan tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Usaha-usaha rekonsiliasi bukannya tak pernah diusahakan, namun kembali lagi solusi konkrit belum pernah bisa di hasilkan. Kajian akademik berupa seminar-seminarpun hampir selalu dilakukan, tidak hanya dengan nasional namun juga internasioanal, sebagai contohnya sarasehan tahun 2000 sebanyak dua kali yakni di Belgia dan Jakarta. Tokoh sekaliber Gus Dur saja telah gagal mengusahakannya di tingkat nasional dari jalur politik. Gus Dur mungkin telah berhasil mengangkat etnis tionghoa dari jurang diskriminasi menjadi warga negara yang sejajar dengan etnis lain, tapi tidak bagi mereka yang dilabeli sebagai komunis. Terbaru adalah usaha rekonsiliasi di gelar dengan mengadakan symposium korban tragedi 1965 pada tanggal 18-19 april 2016, substansi yang berhasil ditangkap dalam acara itu adalah tuntutan permohonan maaf dan pengakuan oleh negara bahwa memang pembantaian massal itu benar-benar terjadi. Tuntutan serupa juga disuarakan oleh Ilham Aidit, Sri Sulistiawati dan Tedjabayu yang menginginkan negara mengeluarkan pengakuan secara jelas tentang adanya pembantaian massal.<sup>16</sup>

Jika diamati Rekonsiliasi merupakan kata kunci dalam menyelesaikan masalah tragedi 1965 ini. Rekonsiliasi mutlak harus dilakukan demi tercapainya keadilan namun para korban menetapkan dua prasyarat yang harus dipenuhi demi suksesnya rekonsiliasi. Yang pertama adalah adanya permohonan maaf dan yang kedua adalah pengakuan oleh negara bahwa memang pembantaian massal itu benar-benar terjadi. Hal ini sesuai argumen bahwa dalam frasa *truth and reconciliation*, terma “kebenaran” diletakkan mendahului “rekonsiliasi” untuk menunjukkan yang satu merupakan syarat mutlak bagi yang lain.<sup>17</sup> Sehingga langkah awal rekonsiliasi harus dimulai dengan tidak lagi menghalangi kebenaran sekitar peristiwa 65 untuk muncul, dengan sendirinya kondisi prasarat untuk rekonsiliasi akan terbentuk. Dalam usaha mengungkap kebenaran dari peristiwa 1965 akan tercapai jika komunitas-komunitas memori berbagai kelompok yang pernah berseteru bersedia bertemu untuk saling mempertukarkan ingatan.<sup>18</sup> Pengungkapan kebenaran dari bertemunya berbagai komunitas memori juga akan membantu melihat kembali kompleksitas realitas kekerasan masa lalu yang artinya akan memunculkan banyak pengakuan dari para pelaku kejadian.

Namun yang harus digaris bawahi bahwa prakarsa pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi harus pertama-tama muncul dari masyarakat sendiri dan itu harus menjadi komitmen bersama. Negara cukup menjadi sarana pelembagaan dan formalisasi apa yang telah dicapai sebagai kesepakatan bersama, dan memberikan kepastian hukum bahwa kesepakatan itu tidak bisa dilanggar. Permohonan maaf walaupun kelihatannya sederhana namun efeknya sangat besar bagi para korban yakni sebagai suatu oase bagi keprihatinan nasional, seperti yang dikatakan oleh Nur Kholis, selaku anggota KOMNAS HAM: Ini tidak menyangkut dengan ideologi. Misalnya presiden harus menyatakan penyesalan kepada partai tertentu (PKI), tidak. Dalam konteks korban-korban anak bangsa itulah, Presiden menyatakan penyesalannya. Dia harus menyatakan penyesalan bahwa telah terjadi *conflicting ideology* (konflik ideologi) di masa lalu.<sup>19</sup>

Walaupun symposium itu kurang berhasil memenuhi ekspektasi para korban, Toh demikian, kegagalan itu tidak selayaknya mematikan semangat. Kalau percobaan dari angkasa belum berhasil, tiada salahnya mengusahakan dari akar rumput, dari tingkat daerah. Tanda-tanda itu setidaknya muncul di Kediri, generasi muda santri Kediri sepertinya mulai terbuka memandang peristiwa 50 tahun yang lalu itu. Hal ini ditunjukkan beberapa saat lalu ketika sejumlah aktivis muda Nahdlatul Ulama di Kediri memberanikan diri menggelar nonton bareng diikuti diskusi film *The Look of Silent* atau Senyap. Sebuah film dokumenter “*terlarang*” yang mengisahkan tentang keluarga korban pembunuhan massal 65. Disaat organisasi Islam lain melarang, mereka justru membuka ruag untuk mendiskusikan film tersebut. Nobar yang digelar di kantor PCNU Kota Kediri pada 13 Desember 2014 itu diikuti sejumlah perwakilan beberapa

<sup>16</sup>Penuturan lebih lengkap oleh ketiga tokoh tersebut disampaikan pada acara Mata Najwa di Metro TV dengan tema *Jalan Penyelesaian 65*, pada tanggal 27 April 2016

<sup>17</sup> Kurniawan, dkk, *Pengakuan Algojo 1965*, cetakan ke-1, Tempo Publishing, Jakarta, 2013, hlm hlm. xi.

<sup>18</sup>Budiawan, *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Suharto*, Jakarta, ELSAM, 2004

<sup>19</sup> BBC Indoneisa.com, *Komnas HAM: Presiden minta maaf kepada korban, bukan kepada PKI*, Senin 28 September 2015.

organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi di Kota Kediri, seperti PMII, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan sebagainya.<sup>20</sup>

## 2. Ketakutan Tentang Kebangkitan Komunisme Atau Komunistophobi(Trauma Terhadap Komunis).

**Komunistophobi** merupakan fenomena yang sering muncul saat peringatan hari kesaktian pancasila hal ini tercermin dari beberapa kasus yang menjadi sempat menjadi perhatian publik adalah penyitaan buku-buku berbau kiri oleh kepolisian. Tindakan ini didahului setelah terdapat beberapa orang yang mengenakan kaos yang berlambang palu arit. Entah berhubungan atau tidak tindakan represif ala orde baru ini kembali berulang tidak lama setelah digelarnya symposium nasional korban tragedi 1965. Namun yang patut dicermati adalah fenomena penyitaan buku beraliran kiri, apa motif dan tujuannya. Mengingat cara-cara semacam itu mengingatkan kita kembali tentang tindakan-tindakan yang dilakukan dibawah kepemimpinan rezim ORBA. Dasar hukum yang dipakai dalam tindakan aparat ini adalah mereka yang memakai kaos berlambang PKI atau memiliki buku beraliran kiri dianggap melanggar Undang-Undang yang kemungkinan besar adalah TAP MPRS XXV/1966 tentang pelarangan ajaran Komunisme.<sup>21</sup>

Fenomena-fenomena ini menimbulkan isu yang lebih jauh lagi dimasyarakat, yakni apakah ini tanda kebangkitan komunisme ? isu-isu seperti ini nampaknya masih menimbulkan kegelisahan pada masyarakat kita walaupun rezim ORBA sudah lama berakhir. bukan bermaksud memvonis bahwa komunisme tidak akan bangkit lagi di Indonesia, namun fakta yang bisa kita amati sekarang bahwa Uni Soviet porak-poranda, China kini sama kapitalisnya dengan Amerika hanya mungkin Korut yang masih menerapkan ideology ini. Ide tentang masyarakat tanpa kelas adalah utopia usang dan sia-sia karena Ideologi itu seungguhnya biasa-biasa saja.<sup>22</sup> Lalu apa yang menyebabkan masyarakat masih dihebohkan dengan fenomena-fenomena semacam ini. Jawaban yang paling logis adalah karena masyarakat Indonesia masih belum bisa lepas dari bayang-bayang kekejaman PKI sehingga timbul ketakutan berlebihan terhadap hal-hal yang berbau komunis atau kita bisa memakai istilah **Komunistophobi**(trauma terhadap komunis).

Hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan karena selama 32 tahun Negara ini berada dibawah rezim ORBA indoktrinasi terhadap masyarakat terkait kekejaman PKI terus dilakukan dengan berbagai bentuk sebagai contohnya buku dan film serta berbagai jalur, yang salah satu dan paling ampuh adalah melalui pelajaran sekolah sehingga memunculkan ingatan kolektif masyarakat bahwa segala hal yang berbau komunis pasti identik dengan atheis, kejam serta penghianat bangsa. Dalam istilah ilmu sejarah Budiawan menyebutnya sebagai sejarah yang ter-ideologisasikan. Sejarah yang seperti ini akan selalu bersifat tertutup, temuan data baru dan penafsiran baru dianggap tabu dan sejarah semacam ini telah menjadi sesuatu yang baku. Selanjutnya sesuatu yang baku itu dipandang itu dipandang alamiah. Oleh karena itu ia pun dicarikan asal-usulnya ke masa lampau, dan dibayangkan akan abadi di masa depan. Proses pengabdian ini terus menerus dilakukan melalui produksi dan reproduksi wacana. Melalui wacana inilah bahasa-ucap dan bahasa-tindak setiap warga suatu komunitas (dicoba) diarahkan sekaligus dikontrol. Yang menarik dari proses sosialisasi wacana semacam ini adalah bahwa yang mengarahkan dan mengontrol itu tidak selalu aparaturnya Negara tapi terkadang dan bahkan lebih sering dilakukan oleh warga komunitas itu sendiri. Dalam konteks masyarakat Indonesia hal ini terlihat pada gejala begitu mudahnya seorang warga menempelkan stigma politik masa lalu sejarah yang telah ter-ideologisasikan itu terhadap warga yang lain.

Kekhawatiran terhadap bahaya komunis ini juga disebabkan oleh adanya usaha mengawetkan wacana anti komunis yang justru dilakukan oleh mereka yang mendukung cita-cita reformasi yang antara

<sup>20</sup> Tribunnews.com, *Aktivistis Muda NU Kediri Nobar Film Senyap*, Sabtu, 13 Desember 2014.

<sup>21</sup> Secara lengkap judul TAP MPRS ini adalah: *Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme*. Mengajarkan peristiwa G30S tanpa “/PKI” dianggap sebagai menyebarkan ajaran Komunisme. Lihat TAP MPR RI No. 1 Th. 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Satus Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, Sekretariat Jendral MPR RI, 2011, hlm 45-46.

<sup>22</sup> Kurniawan, dkk, op. cit hlm. x-xi.

lain adalah demokrasi dan penegakan HAM. Namun disisi lain secara tidak disadari mereka juga mengawetkan wacana ideologis yang merupakan fondasi bagi muncul dan bertahannya ORBA selama tiga dekade. Dengan langkah ini pula mengakibatkan adanya diskriminasi terhadap mereka yang di justifikasi sebagai penghianat bangsa pada bidang hukum dan politik. Komunistophobi yang menutup nalar dan tidak ubahnya seperti mitos yang menghalangi rasionalitas. Tak selayaknya kita alergi terhadap komunisme, sudah lama ideologi itu bankrut. Kini seharusnya kita dapat menghadapi komunisme dan memandang peristiwa G30S serta tragedi pembunuhan masal 65 dengan lebih tenang, rasional dan mengedepankan sisi kemanusiaan.

## KESIMPULAN

Tragedi pembunuhan massal 1965 di Indonesia merupakan peristiwa kelam yang pernah terjadi di negara ini. Di Jawa Timur contohnya, 8256-13.760 jiwa tewas di Kediri, sedangkan di Jombang jumlahnya mencapai 3000-3500 jiwa. Tidak hanya pembunuhan, tindakan penangkapan terhadap mereka yang dituduh komunis banyak dilakukan oleh Orde Baru, dimana mereka yang ditangkap lebih dikenal sebagai Eks Tapol. Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membawa kebebasan pada mereka untuk memberikan kesaksian serta merubah image mereka dari sebelumnya pelaku atau terlibat G30 S menjadi korban yang dilatarbelakangi oleh dua factor yakni proses ditahan dan pengalaman selama ditahanan. Mereka inilah yang saat ini gencar mendorong diadakannya rekonsiliasi nasional.

Dalam rekonsiliasi nasional harus menganut asas *truth and reconcilliation*, yakni terma "kebenaran" diletakkan mendahului "rekonsiliasi" untuk menunjukkan yang satu merupakan syarat mutlak bagi yang lain. Sehingga langkah awal rekonsiliasi harus dimulai dengan tidak lagi menghalangi kebenaran sekitar peristiwa 65 untuk muncul. Sedangkan kebenaran akan tercapai jika komunitas-komunitas memori berbagai kelompok yang pernah berseteru bersedia bertemu untuk saling mempertukarkan ingatan. Disini peran negara cukup menjadi sarana pelembagaan dan formalisasi apa yang telah dicapai sebagai kesepakatan bersama, dan memberikan kepastian hukum bahwa kesepakatan itu tidak bisa dilanggar.

Walupun rezim Orde Baru telah lama lengser, ketakutan akan bahaya komunis masih menghantui masyarakat Indonesia, hal ini tercermin dari tindakan represif berupa penyitaan buku-buku berhaluan kiri oleh aparat. Ketakutan atau **Komunistophobi** ini merupakan hasil dari indoktrinasi rezim orde baru terhadap masyarakat, sehingga memunculkan ingatan kolektif tentang citra PKI sebagai atheis, keji dan penghianat bangsa. Namun sepertinya hal ini berlebihan dengan melihat fakta sekarang bahwa Uni Soviet porak-poranda, China kini sama kapitalisnya dengan Amerika hanya mungkin Korut yang masih menerapkan ideologi ini. Komunistophobi yang menutup nalar dan tidak ubahnya seperti mitos yang menghalangi rasionalitas. Tak selayaknya kita alergi terhadap komunisme, sudah lama ideologi itu bankrut. Kini seharusnya kita dapat menghadapi komunisme dan memandang peristiwa G30S serta tragedi pembunuhan masal 65 dengan lebih tenang, rasional dan mengedepankan sisi kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ben Anderson dan John Roosa dalam *Kitab Merah : Kumpulan Kisah-Kisah Tokoh G30S/PKI*
- BBC Indoneisa.com, *Komnas HAM: Presiden minta maaf kepada korban, bukan kepada PKI*, Senin 28 September 2015
- Budiawan, 2014 *Rehabilitasi Eks-Tapol "Peristiwa 1965" dalam Sejarah Sebagai Humaniora* , OMBAK, Yogyakarta
- Budiawan, 2004 *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Suharto*, Jakarta, ELSAM
- ELSAM, Ringkasan Eksekutif Penyelidikan Peristiwa 65
- Hermawan Sulistiyo, 2013, *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)*, cetakan ke-3, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- John Roosa, dkk, 2004, *Tahun Yang Tak Pernah Berakhir*, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta
- Kurniawan, dkk, 2013, *Pengakuan Algojo 1965*, cetakan ke-1, Tempo Publishing, Jakarta
- Mata Najwa di Metro Tv disiarkan pada tanggal 27 Januari 2016 (Pengakuan Rony Marton) dengan Tema *Dibui Tanpa Jeruji*,
- Mata Najwa di Metro TV , disiarkan pada tanggal 27 April 2016 (Pengakuan Ilham Aidit, Sri Sulistiawati dan Tedjabayu ) dengan tema *Jalan Penyelesaian 65*
- Robert Crib, 2003, *The Indonesian Killings : Pembantaian PKI Di Jawa dan Bali 1965 – 1966*, Penerbit Mata Bangsa, Yogyakarta
- TAP MPRS XXV/1966 tentang pelarangan ajaran Komunisme